

Laporan Kinerja
KPKNL Palembang

Menuju Stabilitas Ekonomi
Tetap Optimis & Waspada

2022



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Pengantar	vi
Ikhtisar Eksekutif	vii
Pendahuluan	
Latar Belakang	1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
Isu Strategis Organisasi	4
Sistematika Laporan	5



Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis	6
Ringkasan/Ikhtisar Kinerja Tahun 2022	9
Pengukuran Kinerja	12



Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja KPKNL Palembang	14
Realisasi Anggaran	23



Penutup	25
----------------	-----------



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	4
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	4
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur	4
Tabel 1.4	Pejabat Fungsional	4
Tabel 2.1	Sasaran Strategis KPKNL Palembang	10
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022	14
Tabel 3.2	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	16
Tabel 3.3	Persentase Produktifitas Lelang	16
Tabel 3.4	Realisasi Pokok Lelang	17
Tabel 3.5	Presentase Hasil Lelang (Pokok Lelang)	17
Tabel 3.6	Tingkat penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	17
Tabel 3.7	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKN	18
Tabel 3.8	Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	18
Tabel 3.9	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	18
Tabel 3.10	Persentase efektivitas penyesuaian BKPN	19
Tabel 3.11	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio asset)	19
Tabel 3.12	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19

Tabel 3.13	Persentase pelaksanaan lelang e-Auction dan e-Conventional Auction	20
Tabel 3.14	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	20
Tabel 3.15	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	20
Tabel 3.16	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan asset	21
Tabel 3.17	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	21
Tabel 3.18	Nilai Hasil <i>Review</i> Pengelolaan Kinerja	21
Tabel 3.19	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	22
Tabel 3.20	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	22
Tabel 3.21	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	23
Tabel 3.22	Penyerapan Anggaran KPKNL Palembang Tahun 2022	24

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	3
Gambar 2.1	Peta Strategi pada Kontrak Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2022	10



PENGANTAR

Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung (SJB), bersama ini kami sajikan Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2022. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Palembang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palembang adalah 111,63% nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada *Stakeholder Perspective* sebesar 27,98%, *Customer Perfective* sebesar 16,78%, *Internal Process Perspective* sebesar 33,76%, *Learning and Growth Perspective* sebesar 33,12%. Selanjutnya, 19 Indikator Kinerja Utama (IKU), 18 IKU memenuhi target yang ditetapkan dan 1 IKU tidak memenuhi target oleh Kantor Pusat DJKN. Pencapaian target tersebut tentunya tidak lepas dari koordinasi dan dukungan yang baik dengan semua *stakeholders*. KPKNL Palembang menyambut positif hasil pencapaian ini dan akan terus berupaya meningkatkan pelayanan prima kepada semua *stakeholders* agar kinerja organisasi dapat semakin meningkat.

Semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta pendorong peningkatan kinerja organisasi DJKN.

Kepala KPKNL Palembang

Ditandatangani secara elektronik
Mardhanus Rudiyanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2022 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Palembang selama tahun 2022 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Palembang atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja KPKNL Palembang menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPKNL Palembang selama tahun 2022.

Visi DJKN adalah menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam mencapai visi tersebut KPKNL Palembang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Palembang mempunyai enam misi yaitu (1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah; (4) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; (6) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam mencapai visi dan misi, KPKNL Palembang menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2020-2024 yaitu pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, pelayanan lelang yang modern dan terpercaya, pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien, birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi DJKN Tahun 2020 berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari 4 perspektif yaitu *stakeholder/customer*, *internal process*, dan *learning and growth*. Peta strategi terkait dengan KPKNL Palembang terdiri dari 4 (empat) Peta Strategi yaitu *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal process Perspective* dan *Learning & Growth Perspective* dan sebelas sasaran strategis yaitu (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (3) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi; (4) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal; (5) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan

Profesional; (6) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif; (7) Edukasi yang Efektif; (8) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif; (9) SDM yang kompeten; (10) Organisasi yang fit for purpose; (11) Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continuously Improved*). Pada tahun 2022 dihasilkan 19 IKU yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kanwil DJKN SJB dengan Kepala KPKNL Palembang.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2022 sangat memuaskan yaitu dari total 19 IKU, 18 IKU berstatus hijau dan hanya 1 IKU dengan status kuning dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,63%.

Implementasi manajemen kinerja *balanced scorecard* di DJKN telah berjalan dengan baik walaupun masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Untuk itu, KPKNL Palembang akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas KPKNL Palembang sebagai organisasi berkinerja tinggi (*high performance organization*) semakin meningkat.

BAB I | Pendahuluan



- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Isu Strategis Organisasi
- D. Sistematika Pelaporan

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2014, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah salah satu eselon satu di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis

di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPKNL Palembang merupakan unit eselon III (tiga) di lingkungan DJKN yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No 4 Gedung Keuangan Negara Lt. 1-2 Blok C Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. KPKNL Palembang memiliki wilayah kerja yang tersebar di 2 (dua) kota dan 7 (tujuh) kabupaten yaitu Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sebagai wujud penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, KPKNL Palembang memiliki 6 (enam) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

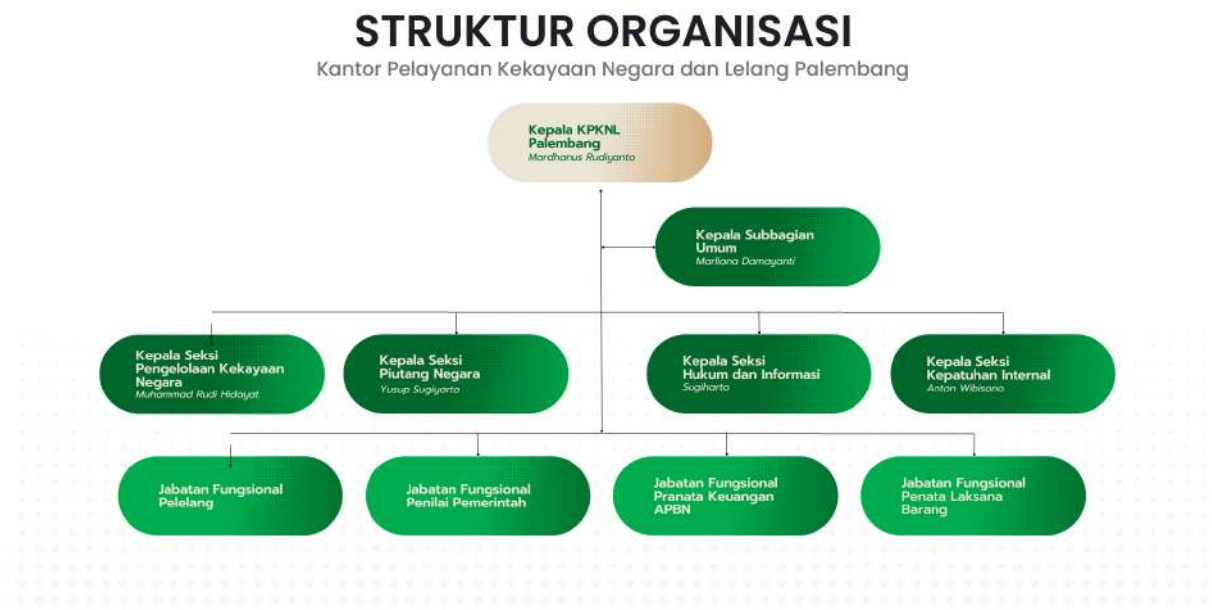
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Palembang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dengan fungsi yang meliputi:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;

- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

KPKNL Palembang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 5 unit Eselon IV dan Pejabat Fungsional yang terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Jabatan Fungsional



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Palembang didukung oleh para pegawai dari berbagai bidang keahlian antara lain keuangan, hukum, ekonomi, dsb. Adapun komposisi pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan, golongan, umur, dan jumlah tenaga fungsional adalah sebagai berikut:

	PENDIDIKAN					JUMLAH PEGAWAI
	S2	S1/DIV	D3	D1	SMU	
KPKNL Palembang	6	18	8	1	6	39

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
(Sumber: Data HRIS per Desember 2022)

GOLONGAN	JUMLAH
I	0
II	8
III	27
IV	4
JUMLAH	39

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
(Sumber: Data HRIS per Desember 2022)

KELOMPOK UMUR	JUMLAH
18-30	4
31-40	13
41-50	17
di atas 50	5
JUMLAH	39

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur
(Sumber: Data HRIS per Desember 2022)

NO	JABATAN FUNSIONAL	JUMLAH
1	Pelelang	6
2	Penilai Pemerintah	4
3	Pranata Keuangan	1
4	Penata Laksana Barang	1
	TOTAL	12

Tabel 1.4 Pejabat Fungsional
(Sumber: Data HRIS per Desember 2022)

C. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Palembang memiliki peran strategis dan permasalahan sebagai berikut:

1. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Amanat konstitusi tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengamankan sumber daya alam strategis untuk

dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari *asset administration* (penatausahaan aset) menjadi *asset manager* (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pengelola barang untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.
3. Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
4. Komitmen DJKN dalam mencapai misi bahwa pengelolaan kekayaan negara dapat menjadi salah satu proses bisnis di Kementerian Keuangan.
5. Hasil revaluasi BMN tahun 2018-2019 dijadikan dasar untuk mengukur nilai BMN secara *up to date* dalam skala nasional di Indonesia.
6. Pengembangan teknologi di dalam organisasi untuk menciptakan suatu yang lebih praktis dan efisien khususnya dalam upaya pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
7. KPKNL Palembang memberikan kontribusi berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengurusan piutang negara dan lelang.
8. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2022 sebagai berikut:

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.

2. BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis organisasi, serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2022.

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Tahun 2022.

5. BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II | Perencanaan Kinerja



- A. Rencana Strategis
- B. Ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja
Tahun 2022
- C. Pengukuran Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Palembang pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi Manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Palembang telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra KPKNL Palembang, terdapat sebelas sasaran, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian adalah:
 - a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang; dan
 - b. Persentase Produktivitas Lelang.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa adalah:
 - a. Persentase Realisasi Pokok Lelang; dan
 - b. Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi adalah Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal adalah:
 - a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK;
 - b. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan;
 - c. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN); dan
 - d. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset).
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian.
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif adalah:
 - a. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction; dan
 - b. Deviasi Data PNBPFungsional DJKN
7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam edukasi yang efektif adalah Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi.
8. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif adalah Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara.
9. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam SDM yang kompeten adalah Persentase

pengembangan kompetensi pegawai.

10. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Organisasi yang *fit for purpose* adalah:
 - a. Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja; dan
 - b. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator.
11. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal adalah:
 - a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran; dan
 - b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Palembang. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Palembang yang akan ditempuh adalah:

1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Menyempurnakan dan memperkuat regulasi di bidang pengelolaan BMN sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
 - b. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
2. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah:
 - a. Penguatan Jabatan Fungsional Pelelang.
 - b. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang.
 - c. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk lelang BMD.
 - d. Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang terkait pelaksanaan lelang ulang untuk objek lelang yang *represtatif* dan *marketable*.
3. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah:
 - a. **Akuntabel**, penilaian dilakukan sesuai prosedur dengan didukung data dan fakta yang akurat baik itu data objek penilaian maupun data objek pembanding.
 - b. **Efisien**, pelaksanaan peilaian dilakukan oleh seorang penilai pemerintah atau tim dimana jumlah hari pelaksanaan dilakukan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan kompleksitas objek penilaian dan jumlah objek penilaian.
4. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai.
 - b. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.

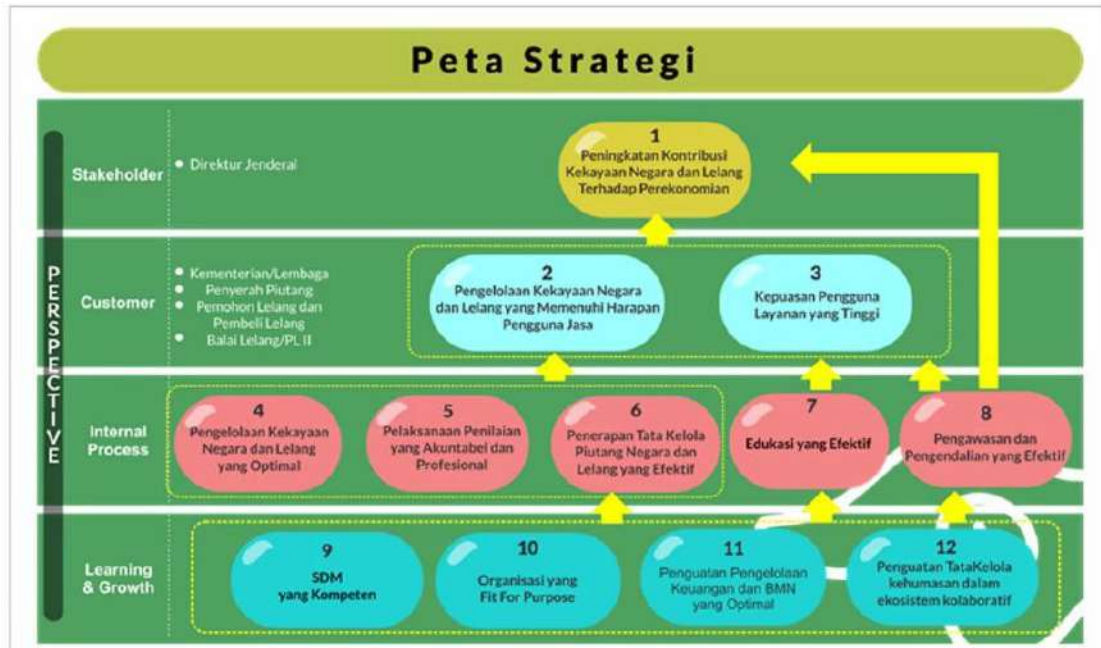
- c. Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya.
- d. Penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.
- e. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.

B. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Palembang. Sasaran Strategis KPKNL Palembang Tahun 2022 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Palembang. Peta Strategi KPKNL Palembang Tahun 2022 memuat sebelas sasaran strategis yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
7. Edukasi yang Efektif;
8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif;
9. SDM yang kompeten;
10. Organisasi yang *fit for purpose*;
11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.



Gambar 2.1 Peta Strategi pada Kontrak Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2022

Peta Strategi DJKN menerapkan 4 perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2022 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Palembang terdapat 11(sebelas) sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel 2.1 berikut:

No.	Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian			
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Persentase	100%	148,91%

No.	Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	Persentase	36%	37,31%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Persentase	100%	318,69%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Persentase	100%	159,47%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi			
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	Indeks	4,56	4,79
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Persentase	65%	78,07%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	Persentase	100%	201,14%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	Persentase	100%	483,33%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Persentase	100%	123,96%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	Persentase	19%	0,02%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E- Conventional Auction	Persentase	92%	100,00%
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	Persentase	10%	0,00%
7	Edukasi yang Efektif			
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks	91	91,85
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif			
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	Persentase	85%	90,08%
9	SDM yang kompeten			
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Persentase	100%	120,00%

No.	Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi
10	Organisasi yang fit for purpose			
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	Indeks	80	88,51
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	Indeks	90	98
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal			
11a- CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase	95.5%	99,83%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Persentase	100%	104,98%

Tabel 2.1 Sasaran Strategis KPKNL Palembang

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2022, KPKNL Palembang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pecapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*.

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang

menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

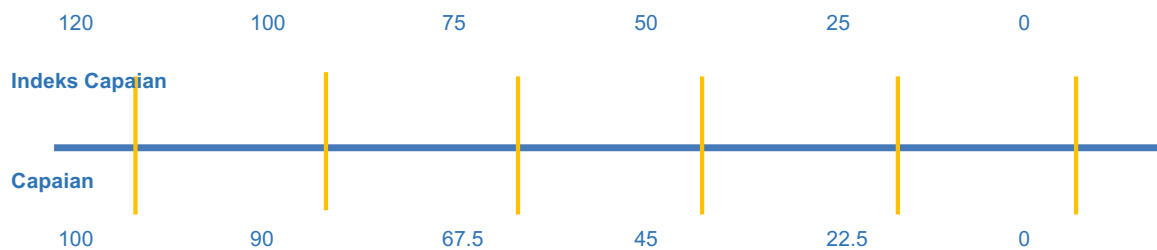
$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi/Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

Dengan grafik sebagai berikut:



I_n = Indeks capaian

I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya

I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya

C_a = Capaian awal

C_n = Realisasi/target x 100%

C_{n+1} = Capaian dengan ketentuan

- a. Apabila Realisasi > Target, maka:

$$C_n = 100 - (C_a - 100), \text{ dimana } C_a \text{ maksimum adalah } 200\%$$

- b. Apabila Realisasi < Target, maka:

$$C_n = C_a$$

C_{n-1} = Capaian dibawahnya

C_{n+1} = Capaian diatasnya

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III | Akuntabilitas Kinerja



A. Capaian Kinerja KPKNL Palembang

B. Realisasi Anggaran



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KPKNL PALEMBANG

Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2022 KPKNL Palembang telah menetapkan 11 Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang diuraikan dibawah ini:

No.	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Indeks
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian			
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	148,91%	120,00%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%	37,31%	103,64%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	318,69%	120,00%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	159,47%	120,00%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi			
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,56	4,79	103,68%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	78,07%	120,00%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	201,14%	120,00%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	483,33%	120,00%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	123,96%	120,00%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	0,02%	120,00%

No.	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Indeks
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E- Conventional Auction	92%	100.00%	108.70%
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0.00%	120.00%
7	Edukasi yang Efektif			
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91	91,85	100,93%
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif			
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%	90,08%	105,97%
9	SDM yang kompeten			
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120.00%	120.00%
10	Organisasi yang fit for purpose			
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80	88,51	110,64%
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	98	108,89%
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal			
11a- CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	99,83%	104,53%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	104,98%	104,98%

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Palembang Tahun 2022 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* KPKNL Palembang sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama:**
 - a. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas

layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tercapai sebesar 148,91% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022		
	Pengelolaan BMN	Piutang Negara	Lelang
Target	18.878.000.000	199.000.000	9.400.000.000
Realisasi	20.162.789.101	262.963.548,84	22.898.267.524
Capaian	106,81%	132,14 %	243,6%

Tabel 3.2 Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

b. Persentase produktifitas lelang

Pada tahun 2022, terdapat IKU Persentase produktifitas lelang yang diperoleh dari jumlah lot lelang laku secara keseluruhan dan jumlah lot lelang secara keseluruhan. Kedua hal tersebut merupakan komponen dalam menghitung capaian IKU Persentase produktifitas lelang, capaian sebesar 103,64% didapat dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022
Jumlah lot lelang total	1.836
Jumlah lot lelang yang laku	644
Capaian	37,31%

Tabel 3.3 Persentase Produktifitas Lelang

2. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama:

a. Persentase hasil lelang (Pokok lelang)

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBPN lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/Jabatan Fungsional Pelelang), dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimal evaluasi kinerja

Pelaksanaan lelang yang optimal dapat teridentifikasi dari hasil lelang yang kompetitif dengan terjualnya barang yang dilelang minimal sesuai dengan harga dasar/limit lelang dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara.

Pada tahun 2022, terdapat IKU persentase hasil lelang yang diperoleh dari persentase realisasi jumlah pokok lelang kelas I ditambahkan Pegadaian terhadap target. Hal tersebut merupakan komponen dalam menghitung capaian IKU persentase hasil lelang. Untuk tahun 2022 sendiri, capaian sebesar 318,69% didapatkan dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok Lelang 2022	
	Target	Realisasi
Pejabat Lelang Kelas I	162.000.000.000	516.276.393.769
Pegadaian	93.000.000.000	114.704.548.000
Total Pokok Lelang 2022	255.000.000.000	630.980.941.769

Tabel 3.4 Realisasi Pokok Lelang

	2021	2022
Target	274.000.000.000	255.000.000.000
Realisasi	302.632.421.721	630.980.941.769
Capaian	110,45%	318,69%

Tabel 3.5 Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang)

b. Tingkat penurunan *outstanding* Piutang Negara

IKU tingkat penurunan *outstanding* piutang negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat penurunan *outstanding* piutang negara diperoleh dari piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2016. Capaian IKU tingkat penurunan *outstanding* piutang negara sebesar 153,47% dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2022
Target	3.000.000.000	5.026.000.000
Realisasi	5.961.091.938	8.015.073.849
Capaian	198,70%	159,47%

Tabel 3.6 Tingkat penurunan *outstanding* piutang negara

3. **Sasaran Strategis Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi dengan Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) KPKNL**

Terjadi peningkatan IKPL KPKNL Palembang dari target tahun 2022, dari 4,62 menjadi 4,79. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pengguna jasa dapat

ditingkatkan seiring dengan kualitas layanan yang meningkat, hal ini sejalan juga dengan rencana KPKNL Palembang meraih predikat ZI WBK. Perbandingan antara realisasi kinerja indeks kepuasan pengguna layanan pada KPKNL Palembang 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

	2021	2022
Target	4,60	4,62
Realisasi	4,75	4,79
Capaian	103,26%	103,68%

Tabel 3.7 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

4. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama:

a. Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

Penggunaan barang milik negara yang sesuai standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara atas pengelolaan aset negara, termasuk *existing* luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan dengan persetujuan Pengelola Barang.

	2021	2022
Target	62%	65%
Realisasi	83,72%	78,07%
Capaian	135,03%	120,11%

Tabel 3.8 Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

b. Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan

Perbandingan antara realisasi kinerja persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Palembang adalah sebagai berikut:

	2021	2022
Target	489	175
Realisasi	529	352
Capaian	108,18%	201,14%

Tabel 3.9 Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan

c. Persentase efektivitas penyesuaian BKPN

Tahapan pengurusan piutang negara dimulai sejak diterimanya penyerahan piutang negara sampai dengan piutang negara dinyatakan lunas atau selesai. Pengurusan piutang negara dikatakan optimal apabila dapat menyelesaikan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang masuk dalam kewenangan KPKNL,

berhasil melakukan penagihan piutang negara, dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara.

	2021	2022
Target	133	30
Realisasi	136	145
Capaian	102,26%	483,33%

Tabel 3.10 Persentase efektivitas penyesuaian BKPN

d. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (*Portofolio asset*)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja asset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial, dan kondisi teknis. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN tercapai sebesar 1203,96% dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2022
Target	143	286
Realisasi	152	324
Capaian	106,29%	123,96%

Tabel 3.11 Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio asset)

5. Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional dengan Indikator Kinerja Utama berupa Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dipertanggungjawabkan serta memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan pengelolaan BMN oleh Pengelola Barang. Capaian IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian sebesar 120% dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2022
Target	22%	19%
Realisasi	0,71%	0,02%
Capaian	120%	120%

Tabel 3.12 Deviasi ketergunaan hasil penilaian

6. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama:

a. Persentase pelaksanaan lelang *e-Auction* dan *e-Conventional Auction*

Pada tahun 2022, terdapat IKU Persentase pelaksanaan lelang *e-Auction* dan *e- Conventional Auction* yang diperoleh dari jumlah realisasi Frekuensi *e- Auction* dan jumlah realisasi Frekuensi *e-Conventional Auction*. Target capaian *e-Auction* dan *e- Conventional Auction* pada KPKNL Palembang tahun 2022 adalah sebesar 92% dan terealisasi sebesar 108,7%.

Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah realisasi Frekuensi e- Auction	92%	100%	108,7%
Jumlah realisasi Frekuensi e-Conventional Auction	-	-	-

Tabel 3.13 Persentase pelaksanaan lelang *e-Auction* dan *e-Conventional Auction*

b. Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dan Bea Lelang PL I dan Pegadaian.

Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Deviasi Data PNBPN Lelang	10%	0,00%	120%
Deviasi Data PNBPN Piutang Negara	10%	0,00%	120%
Rata-rata Target	10%	0,00%	120%

Tabel 3.14 Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN

7. Sasaran Strategis Edukasi yang Efektif Indikator Kinerja Utama berupa Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan umpan balik yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

	2021	2022
Target	90,50%	91%
Realisasi	90,98%	91,85%
Capaian	100,53%	100,93%

Tabel 3.15 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

8. Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif dengan Indikator Kinerja Utama berupa Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Aset

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. Capaian IKU ini dihitung dengan membandingkan jumlah

persetujuan/penetapan pengelolaan BMN pada periode semester II tahun 2021 s.d. semester I tahun 2022 yang ditindaklanjuti oleh Satker K/L dengan jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan Pengelola Barang pada periode semester II tahun 2021 s.d. semester I tahun 2022.

	2021	2022
Target	85%	85%
Realisasi	85,38%	90,08%
Capaian	100,45%	105,97%

Tabel 3.16 Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan asset

9. Sasaran Strategis SDM yang Kompeten Indikator Kinerja Utama berupa Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Perbandingan antara realisasi kinerja persentase pengembangan kompetensi pegawai, *hard competency* dan *soft competency* serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Palembang adalah sebagai berikut:

	2021	2022
Target	100%	100%
Realisasi	120%	120%
Capaian	120,00%	120,00%

Tabel 3.17 Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

10. Sasaran Strategis Organisasi yang *Fit For Purpose* dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama

a. Nilai hasil *review* pengelolaan kinerja

Pada tahun 2022 realisasi target hasil *review* pengelolaan kinerja KPKNL Palembang mencapai 99,75% yang berarti capaian target untuk IKU ini adalah 120%.

	2021	2022
Target	75	80%
Realisasi	91,20	88,51%
Capaian	120,00%	110,64%

Tabel 3.18 Nilai Hasil *Review* Pengelolaan Kinerja

b. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Pada tahun 2022 realisasi target efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator KPKNL Palembang mencapai 98% yang berarti capaian target untuk IKU ini adalah 108,89%.

	2021	2022
Target	80	90%
Realisasi	97,48	98%
Capaian	120%	108,89%

Tabel 3.19 Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

11. Sasaran Strategis Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama:

a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Palembang adalah sebagai berikut:

	2021	2022
Target	95,5%	95,5%
Realisasi	95,95%	99,83%
Capaian	100,47%	104,53%

Tabel 3.20 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Unsur yang diukur terdiri dari penyerapan anggaran atas pagu netto, efisiensi, dan pencapaian keluaran riil yang diartikan sebagai berikut:

- 1) Penyerapan anggaran atas pagu netto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran yang tercantum dalam RKA-KL/DIPA tidak termasuk *self blocking*, hasil efisiensi, dan dana khusus.
- 2) Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja modal, meliputi objek perjalanan dinas, RDK, konsinyering, kudapan dan makan siang rapat, langganan daya dan jasa, honorarium.
- 3) Pencapaian keluaran riil adalah pencapaian atas barang/jasa sebagai hasil akhir setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pengukuran mengikuti SE-35/MK.1/2017 tentang Tata Cara Pengukuran IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang dilakukan KPKNL Palembang antara lain:

- a) Sinergi yang baik antara KPKNL Palembang dan *stakeholders* sehingga target dapat tercapai.
- b) Kerjasama (*teamwork*) internal yang solid untuk mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi di KPKNL Palembang.
- c) Meningkatkan motivasi SDM melalui kegiatan diklat, sosialisasi, *sharing knowledge* agar pegawai tetap memiliki integritas dan profesionalisme dalam bekerja.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan secara internal meliputi:

- a) *Sharing knowledge* melalui rapat pembinaan, diskusi, sosialisasi internal terhadap peraturan baru.
- b) Mendorong pegawai untuk lebih kreatif dan berinovasi guna memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi kantor serta pelayanan kepada *stakeholder*.

b. Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Palembang adalah sebagai berikut:

	2021	2022
Target	-	100%
Realisasi	-	104,98%
Capaian	-	104,98%

Tabel 3.21 Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk membiayai seluruh kegiatan KPKNL Palembang pada tahun 2022, telah dialokasikan DIPA (setelah direvisi) sebesar Rp1.054.956.000,00. Dilihat dari nilai capaian program pelaksanaan penggunaan DIPA, secara umum KPKNL Palembang tidak mengalami kesulitan dalam masalah pembiayaan kegiatan kantor.

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi s.d 31 Des 2022	
		(Rp)	%
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Barang	1.771.648.000	1.714.496,02	96,77%
Jumlah	1.771.648.000	1.714.496,02	96,77%

Tabel 3.22 Penyerapan Anggaran KPKNL Palembang Tahun 2022

Adapun gambaran target dan realisasi kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2022 meliputi:

- a. Rencana kegiatan;
- b. Perhitungan keluaran riil;
- c. Perhitungan hasil efisiensi;
- d. Penyerapan Anggaran atas pagu netto;
- e. Capaian Keluaran riil;
- f. Konsistensi Rencana Penarikan Dana;
- g. Laporan Capaian Output; dan
- h. Kualitas pelaksanaan anggaran kami sampaikan sebagaimana terlampir.

BAB IV | Penutup





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024 yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024.

Pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Palembang pada tahun 2022 secara umum dapat dikatakan baik karena 18 (delapan belas) IKU KPKNL Palembang berwarna hijau dan hanya 1 (satu) yang masih kuning dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,63%.

Dalam rangka mengamankan sasaran dan tujuan diperlukan strategi untuk menghadapi berbagai kendala yang ada, strategi yang diterapkan oleh KPKNL Palembang adalah:

1. Melakukan kerjasama dan kolaborasi yang sinergis antara KPKNL dan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah sehingga target dapat tercapai.
2. Melakukan inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi di KPKNL Palembang.
3. Selalu menjaga kualitas layanan sesuai dengan janji layanan KPKNL Palembang.
4. Meningkatkan motivasi SDM melalui kegiatan diklat, sosialisasi, *sharing knowledge* agar pegawai tetap memiliki integritas dan profesionalisme dalam bekerja.
5. Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
 - a. koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara KPKNL dengan para pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan *self awarness* Satuan Kerja terkait dengan optimalisasi Barang Milik Negara, termasuk dalam peningkatan PNBPN dari pengelolaan BMN;
6. Terkait pelayanan Penilaian kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
 - a. Penilaian dilakukan sesuai prosedur dengan didukung data dan fakta yang akurat baik itu data objek penilaian maupun data objek pembanding; dan
 - b. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh seorang penilai pemerintah atau tim dimana jumlah hari pelaksanaan dilakukan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan kompleksitas objek penilaian dan jumlah objek penilaian.
7. Terkait Pengurusan Piutang Negara kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
 - a. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada Debitur/Penangguang Hutang agar

- tetap melunasi/mengangsur hutangnya;
- b. Melakukan penggalian potensi piutang negara/daerah terus ditingkatkan kepada Penyerah Piutang; dan
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak BPN untuk mengetahui letak barang jaminan khususnya tanah dan bangunan, meminta pendampingan Penyerah Piutang dalam pelaksanaan penyitaan.
8. Terkait Lelang kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
 - a. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk lelang BMD; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang terkait pelaksanaan lelang ulang untuk objek lelang yang repretatif dan *marketable*.
 9. Selalu berupaya untuk mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Segala yang dicapai saat ini merupakan hasil kerjasama semua pegawai KPKNL Palembang, dimana hal ini harus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Suatu tujuan tidak akan tercapai apabila tidak ada komitmen dan konsistensi yang telah direncanakan bersama. Dalam upaya menjaga komitmen dan konsisten maka dibutuhkan kerjasama dan kebersamaan seluruh jajaran di lingkungan KPKNL Palembang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Palembang ini, diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan baik kepada instansi vertikal di atasnya maupun semua jajaran di lingkungan KPKNL Palembang. Akhir kata “Tak ada gading yang tak retak”, KPKNL Palembang dengan kerendahan hati menerima saran/masukan yang konstruktif untuk perbaikan menuju tercapainya visi dan misi DJKN tercinta.

LAMPIRAN I

Formulir Pengukuran Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2022



NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
PERIODE DESEMBER
TAHUN 2022

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
Stakeholder Perspective (25%)								27,98%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian						111,90%		
1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	148,91%	14%	50%	148,907%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	90%	97,37%	14%	50%	103,81%	103,81%	hijau
Customer Perspective (15%)								15,28%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						120,00%		
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	239%	14%	50%	238,72%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	159,47%	14%	50%	159,47%	120,00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi						103,68%		
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,62	4,79	21%	100%	103,68%	103,68%	hijau
Internal Process Perspective (30%)								33,76%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal						120,00%		
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SRSK	P/L	65%	78,07%	19%	30%	120,11%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	201,14%	19%	30%	201,14%	120,00%	hijau
4c-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	483,33%	14%	22%	483,33%	120,00%	hijau
4d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	123,03%	11%	17%	123,03%	120,00%	
5	Pelaksanaan Penilaian yang akuntabel dan profesional						120,00%		
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	0,02%	14%	100%	199,89%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang efektif						114,35%		
6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	100,00%	14%	50%	108,70%	108,70%	hijau
6b-CP	Deviasi Data PNEP Fungsional DKN	P/M	10,0%	-0,24%	14%	50%	202,35%	120,00%	hijau
7	Edukasi yang efektif						102,27%		
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	91	93,07	14%	100%	102,27%	102,27%	hijau
8	Pengawasan dan pengendalian yang efektif						105,97%		
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	90,08%	14%	100%	105,97%	105,97%	hijau
Learning & Growth Perspective (30%)								33,12%	
9	SDM yang kompeten						120,00%		
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
10	Organisasi yang fit for purpose						109,77%		
10a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	80	88,51	14%	50%	110,64%	110,64%	hijau
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90	98,00	14%	50%	108,89%	108,89%	hijau
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal						101,42%		
11a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	93,45%	14%	50%	97,85%	97,85%	kuning
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	104,98%	14%	50%	104,98%	104,98%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								111,63%	hijau

LAMPIRAN II

Perjanjian Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2022





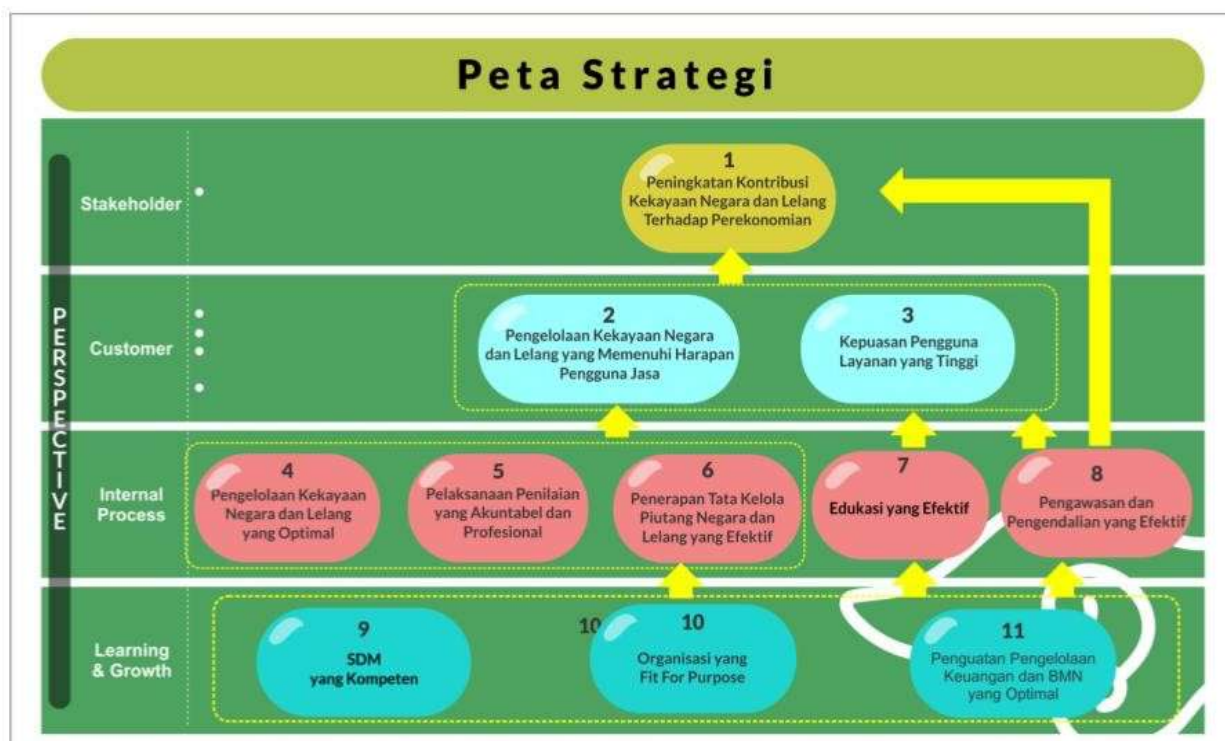
**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 9/KN.16/2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALEMBANG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palembang, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PALEMBANG
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase produktivitas lelang	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,62
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
9	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90



11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	0
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	6.721.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	0
3. Pengelolaan Aset	324.307.000
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	0
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	0
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	0
Dukungan Manajemen	0
1. Legislasi dan Litigasi	10.464.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.324.501.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	3.605.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	0
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	6.280.000
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	0

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan
Bangka Belitung



Ditandatangani Secara Elektronik
Surya Hadi

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Palembang



Ditandatangani Secara Elektronik
Ridho Wahyono



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PALEMBANG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	-	4,62
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Edukasi yang Efektif							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	-	-	-	-	91
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	40%	-	40%	-	40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	-	80
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator?	90	90	90	90	90	90	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
11b-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Ridho Wahyono



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
 Ridho Wahyono

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 13 April 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 4 Januari 2023



Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN
1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Ridho Wahyono	NAMA	Surya Hadi
NIP	197101191998031001	NIP	196304211992031002
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase produktivitas lelang	36%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pegguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pegguna Jasa	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
5	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,62
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
7	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
8	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
9	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset	100%
10	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
11	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction	92%

Kontrakkinerjaberlakusejaktanggal1 Januari 2022 dan ditetapkansecaraelektronikmenggunakan digital
signature pada tanggal«TanggalPenandatanganan»



	dan Lelang yang Efektif	dan E-Conventional Auction	
12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
13	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91
14	Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
15	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
16	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
17	Organisasi yang Fit For Purpose	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator?	90
18	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
19	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

B. KINERJA TAMBAHAN

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Ridho Wahyono
NIP 197101191998031001

Palembang, 31 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Surya Hadi
NIP 196304211992031002



